

POLA REKRUTMEN POLITIK PADA DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL KABUPATEN WAJO PROVINSI SULAWESI SELATAN

Muh. Hidayat
NPP. 29. 1030

*Asdaf Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan
Program Studi Politik Indonesia Terapan*

Email: muhammadhdytt@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): (Contains the background behind the research) Political parties based on the regulation of legislation, namely Law No. 2 of 2011 concerning Political Parties, regulate the functions of political parties, one of which is political recruitment. Of course, the arrangement is regulated by the part of cadreization, without cadreization does not mean anything, political parties need a generational renewal to renew their resources to run political parties. PAN's position in Indonesia's political development, particularly in Wajo Regency, South Sulawesi, must feature qualified leaders to manage the party's survival. PAN has a fairly good electability in Wajo Regency, PAN's political recruitment process is regulated in the articles of association and bylaws aimed at Indonesian citizens for the regeneration of party members. **Objectives:** This study aims to find out the political recruitment process of the Regional Leadership Council of the Wajo Regency National Mandate Party in the selection of cadres for political positions and party positions and to find out what factors are the basis for determining political recruitment. **Methods:** The research used by the author is qualitative research with a descriptive method through an inductive approach. The authors used primary data and secondary data to obtain research data. Primary data is sourced from interviews conducted with informants while secondary data is sourced from KPU Regulation Number 20 of 2018 concerning AD/ART PAN, requirements for legislative candidates, The Management Structure of the Regional Leadership Council of the Wajo Regency National Mandate Party. Data collection uses interview techniques, qualitative observation and documentation. **Results/Findings:** The results showed that the recruitment system created by the Wajo Regency National Mandate Party was open recruitment by giving agreements to all citizens to compete in the selection process. Then the decisive factors in the political recruitment of the Regional Leadership Council of the Kabupaten Wajo National Mandate Party are the shoplifting, party ideology and finances. **Conclusion:** Everyone who qualifies has equal opportunities in conducting competitions in both political and administrative positions. So, every candidate for pan public office is decided by the PAN DPD wajo district, According to Rush and Althoff the pan recruitment pattern in determining legislative candidates for elections is closed.

Keywords: Political recruitment patterns, National Mandate Party, Regional Leadership Council

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): (Berisi *background* yang melatarbelakangi penelitian) Partai politik berdasarkan pengaturan perundang-undangan yakni UU No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, mengatur fungsi partai politik salah satunya yakni rekrutmen politik. Tentu pengaturan tersebut diaturlah bagian kaderisasi, tanpa kaderisasi tidak berarti apa-apa, partai politik membutuhkan pembaharuan generasi untuk memperbarui sumber daya kemampuannya untuk menjalankan parpol. Kedudukan PAN dalam pembangunan politik Indonesia, khususnya di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan harus menampilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas untuk mengelola kelangsungan hidup partai. PAN memiliki elektabilitas yang cukup bagus di Kabupaten Wajo, Proses rekrutmen politik PAN diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang ditujukan untuk warga negara Indonesia untuk regenerasi anggota partai. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses rekrutmen politik Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Wajo dalam pemilihan kader untuk jabatan politik dan jabatan partai serta untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi dasar dalam menentukan rekrutmen politik. **Metode:** penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif melalui pendekatan induktif. Penulis menggunakan data primer dan data sekunder untuk mendapatkan data penelitian. Data primer bersumber dari wawancara yang dilakukan dengan informan sedangkan data sekunder bersumber dari Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang AD/ART PAN, persyaratan bakal calon legislatif, Struktur Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Wajo. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi kualitatif dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem rekrutmen yang diciptakan Partai Amanat Nasional Kabupaten Wajo adalah rekrutmen terbuka dengan memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara untuk bersaing dalam proses seleksi. Kemudian faktor-faktor yang menentukan dalam rekrutmen politik Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Wajo yaitu ketokohan, ideologi partai dan finansial. **Kesimpulan:** Setiap orang yang memenuhi syarat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi baik dalam jabatan politik maupun jabatan administrasi. Jadi, setiap calon pejabat publik PAN diputuskan oleh DPD PAN Kabupaten Wajo, Menurut Rush dan Althoff pola rekrutmen PAN dalam menetapkan calon anggota legislatif untuk pemilu adalah bersifat tertutup.

Kata Kunci: Pola rekrutmen politik, Partai Amanat Nasional, Dewan Pimpinan Daerah

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu kendaraan sistem demokrasi yaitu partai politik yang mempunyai hubungan kuat terhadap suprastruktur politik meliputi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam penerapan demokrasi, rakyat yang paling tahu apa yang dia butuhkan sekalipun dalam pertumbuhannya sistem demokrasi sangat rawan terhadap kekacauan, suasana itulah yang mengakibatkan dalam setiap pemilu masyarakat bebas dalam menentukan pilihannya. Setiap partai politik memiliki cara atau sistem perekrutan anggota yang berbeda-beda. Dalam proses perekrutan politik tujuannya bukan hanya untuk menjadikan seseorang sebagai kader partai politik akan tetapi menjadikan kader tersebut sebagai sarana dalam menempatkan kadernya dalam jabatan eksekutif maupun legislatif. Partai politik merupakan tonggak demokratis di seluruh negara. Adanya partai politik tuntutan masyarakat dapat diusahakan, oleh karena itulah yang menjadi tugas partai politik dalam suatu negara. Partai Amanat Nasional atau yang dikenal dengan PAN didirikan oleh Amien Rais yang berawal dari organisasi Muhammadiyah pada tahun 1998. Kedudukan PAN dalam pembangunan politik Indonesia, khususnya di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan harus menampilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas

untuk mengelola kelangsungan hidup partai. PAN memiliki elektabilitas yang cukup bagus di Kabupaten Wajo. Selain pada pemilu 2019 mendapatkan perolehan suara terbanyak, PAN juga sukses memenangkan pilkada tahun 2018 ketika pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Wajo. PAN merupakan partai besar tentunya memiliki kader dan simpatisan yang tersebar diseluruh penjuru nusantara. Oleh karena itu, PAN diharapkan mampu melaksanakan fungsinya khususnya pada fungsi rekrutmen politik.

1.2 Kesenjangan Masalah Yang Diambil (GAP Penelitian)

Kualitas dari proses kaderisasi partai politik pastinya akan berpengaruh terhadap kualitas kader yang dihasilkan untuk dipilih dalam pengisian posisi penting di dalam partai tersebut maupun untuk diusung dalam pemilihan umum. Namun penulis menemukan beberapa fenomena yang kerap terjadi dalam proses perekrutan politik seperti adanya kader loncatan, kader karbitan, dan kader titipan. Partai politik kadang cuma bergantung kepada orang-orang tertentu yang membuat kader yang diusung untuk menduduki pimpinan partai maupun untuk pemilihan umum tidak berubah. Sehingga banyak kader yang sudah mengabdikan bertahun-tahun untuk partai, jika tidak mampu mendapatkan posisi didekat para elite partai tidak akan diusung untuk maju dalam mendapatkan kursi di jabatan eksekutif maupun legislative. Proses rekrutmen politik PAN diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang ditujukan untuk warga negara Indonesia untuk regenerasi anggota partai. Mekanisme tersebut dilaksanakan secara terbuka untuk menjadi anggota partai maupun untuk menjadi wakil rakyat di legislatif dan eksekutif. Sebagaimana yang tertuang dalam anggaran rumah tangga, PAN memiliki persyaratan-persyaratan dalam melakukan proses rekrutmen politik.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah pedoman yang dijadikan untuk penelitian selanjutnya dengan bahasan yang menyerupai maupun relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan dan perbandingan sebagai perbaikan kedepannya. Penelitian pertama oleh Rex Tiran dan Syahrin B Kamahi (2021) Sistem rekrutmen yang diciptakan Golkar yakni rekrutmen terbuka. DPC partai Golkar Kota Kupang menyediakan dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk ikut bersaing dalam proses penyeleksian. Penilaian berdasarkan proses dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, melalui pertimbangan-pertimbangan yang objektif rasional. Setiap orang yang memenuhi syarat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi baik dalam jabatan politik maupun jabatan administrasi. Secara teori yang dikemukakan oleh Rush dan Althoff, Pola rekrutmen DPC partai Golkar Kota Kupang masih menetapkan caleg berdasarkan pengaturan yang bersifat oligarki. Penelitian kedua oleh Steven J Kaputeni (2020) Hasil kajian menggambarkan bahwa dengan melaksanakan rekrutmen politik pada pilkada 2020, Partai Nasdem tidak memungut biaya atau mahar politik, yang merupakan terobosan dan gebrakan terbesar bagi partai-partai pencetus kegagalan politik di Indonesia sesuai komitmennya, yaitu Restorasi Indonesia. Penelitian Ketiga oleh Tarsan Asmara dan Misran Safar Samiruddin T (2019) Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola rekrutmen DPD II partai Golkar dalam menetapkan calon legislatif pada pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Muna cenderung dilakukan secara tertutup yaitu baik melalui cara koopsi. DPD II partai Golkar dalam proses seleksi calon legislatif membentuk koordinator calon legislatif di setiap dapil yang kemudian ditugaskan membantu merekrut kader-kader lain untuk menjadi calon legislatif di masing-masing dapilnya.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa rekrutmen politik sangat menarik untuk diteliti. Penelitian ini dibuat karena penulis melihat celah penelitian tentang rekrutmen politik. Penelitian terdahulu cenderung cuma membahas tentang bagaimana rekrutmen politik terhadap calon kepala daerah maupun calon wakil rakyat. Sehingga penulis membuat fokus penelitian terhadap bagaimana pola rekrutmen politik di internal partai untuk calon pejabat partai maupun untuk jabatan publik.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses rekrutmen politik Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Wajo dalam pemilihan kader untuk jabatan politik dan jabatan partai serta untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi dasar dalam menentukan rekrutmen politik.

II. METODE

Dalam penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan suatu keadaan yang sebenarnya di lapangan yang dilakukan dengan mengumpulkan data lalu dianalisis dan dirumuskan terhadap masalah yang ditemukan dengan teori yang selalu berkembang dalam proses pengumpulan data. Penulis menggunakan data primer dan data sekunder untuk mendapatkan data penelitian. Data primer bersumber dari wawancara yang dilakukan dengan informan sedangkan data sekunder bersumber dari Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang AD/ART PAN, persyaratan bakal calon legislatif, Struktur Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Wajo. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi kualitatif dan dokumentasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Proses Rekrutmen Pemilihan Kader Dalam Jabatan Publik dan Jabatan Partai

Rekrutmen politik selalu memiliki kertekaitan erat dengan partai politik. Partai politik sendiri merupakan sebuah alat yang digunakan seseorang untuk dapat menduduki sebuah jabatan politik. Pada Pemilu Legislatif tahun 2019 di Kabupaten Wajo, terdapat sebelas Partai Politik yang ikut serta dalam pemilu salah satunya yaitu Partai Amanat Nasional. Sangat penting apabila Partai Politik sadar akan fungsinya sendiri dikarenakan penentu berkualitas atau tidaknya seorang anggota legislative nantinya ditentukan oleh pola rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik, dan apabila partai politik sadar akan tupoksinya, tentunya akan menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat terhadap partai tersebut. Hal ini tentunya berbeda dengan Komisi Pemilihan Umum, meskipun sama-sama dalam melaksanakan sebuah seleksi, namun seleksi yang dilakukan oleh KPU hanyalah bersifat sekunder, sehingga bila seorang calon telah memenuhi persyaratan umum maka tidak ada alasan bagi pihak KPU untuk tidak meloloskan calon ke tahap selanjutnya. Pada analisis ini penulis menggunakan teori rekrutmen politik dari Pippa Norris untuk mengetahui proses rekrutmen yang dilakukan oleh Partai Amanat Nasional Kabupaten Wajo dalam melakukan pemilihan kader untuk jabatan publik dan jabatan partai. Menurut Pippa Norris ada 3 tahapan yaitu:

a. Sertifikasi

Partai Amanat Nasional Kabupaten Wajo dalam proses merekrut bakal calon legislatif secara umum telah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Pippa Norris yaitu dalam merekrut kader harus berkaitan dengan persyaratan formal baik dari undang-undang pemilu dan konstitusi partai. Hal tersebut dapat dilihat dari proses rekrutmen yang dilakukan oleh Partai Amanat Nasional Kabupaten Wajo mengenai syarat menjadi anggota. Partai Amanat Nasional Kabupaten Wajo melaksanakan rekrutmen politik berasal dari internal dan eksternal partai. Internal partai berasal dari kader dan tingkatan pengurus Partai Amanat Nasional Kabupaten Wajo baik dari tingkat kabupaten maupun kecamatan.

b. Penominasian

Setelah proses sertifikasi, selanjutnya dilakukan proses nominasi. Hal ini sebagaimana dijelaskan Pippa Norris bahwa proses nominasi berkaitan dengan pola kekuasaan dalam

tubuh partai dalam menentukan bakal calon seperti apa yang diinginkan. Apakah nominasi ditentukan oleh pimpinan partai (sentralisasi) atau didelegasikan ke bawah (desentralisasi). Dalam tubuh Partai Amanat Nasional Kabupaten Wajo dalam proses penominasian melihat dari potensi kader yang dimiliki terlebih dahulu. Rekrutmen terbuka sebagaimana dimaksud adalah rekrutmen calon pejabat publik yang berasal dari internal dan eksternal partai. Partai Amanat Nasional Kabupaten Wajo memiliki pola rekrutmen terbuka karena mereka tidak hanya menjaring nama-nama dari internal partai tapi juga melihat di eksternal partai.

c. Pemilihan

Proses selanjutnya adalah proses pemilihan atau pengambilan keputusan terhadap bakal caleg yang akan dicalonkan pada pemilihan umum. Dalam pengambilan keputusan calon pejabat publik dari Partai Amanat Nasional, DPD Partai Amanat Nasional memiliki peranan yang sentral karena keputusan tertinggi ada di tangan DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Wajo. Jadi setiap calon pejabat publik dari Partai Amanat Nasional Kabupaten Wajo diputuskan oleh DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Wajo bukan dari DPC yang ada di kecamatan. proses seleksi calon pejabat publik dalam hal ini calon legislatif oleh Partai Amanat Nasional Kabupaten Wajo tersentralisasi di DPD dan DPC tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan tersebut. Akan tetapi dalam prosesnya, semua bakal calon legislatif harus tetap mengikuti tahapan yang dilakukan oleh Partai Amanat Nasional Kabupaten Wajo. Jika berasal dari non kader maka harus mengikuti pengkaderan sebagai anggota partai terlebih dahulu untuk mendapatkan kartu tanda anggota sebagai syarat untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif usungan dari Partai Amanat Nasional Kabupaten Wajo.

Berdasarkan tipologi yang dikembangkan oleh Katz and Mair, ada empat model partai berdasarkan karakteristik, yaitu elit, massa, kader, *catch-all*. Berdasarkan hasil penelitian, Partai Amanat Nasional Kabupaten Wajo merupakan partai elit karena keputusan pemilihan bakal calon legislatif diputuskan hanya oleh segelintir orang yang mempengaruhi kegiatan organisasi partai. Menurut Katz dan Mair, elit partai seringkali dapat dilihat dari bagaimana partai menjalankan politik kepartaian, seperti mengidentifikasi kandidat pemilihan umum, sikap, atau program dan kebijakan, pemerintah diputuskan secara tertutup. Akibatnya, persaingan intra-partai cenderung terbatas. Berdasarkan hasil temuan tentang pola rekrutmen politik Partai Amanat Nasional Kabupaten Wajo terhadap calon legislatif, pengambilan keputusan sepenuhnya diambil oleh DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Wajo. DPC tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan tersebut. DPC hanya mengajukan nama-nama yang ingin menjadi calon legislatif kepada DPD. Pada tahap ini akan dianalisa ketokohan, soliditas partai, finansial, dan bersedia tunduk terhadap kebijakan partai. Kemudian penetapan dilakukan oleh DPD.

3.2 Faktor Yang Menentukan Proses Rekrutmen Politik Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Wajo

3.2.1 Ketokohan

Pada pemilu legislatif DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Wajo sebagai pihak yang melakukan proses rekrutmen di tingkatan kabupaten mempunyai persyaratan yang tidak formal tapi sangat penting dalam meningkatkan suara partai, yaitu calon harus memiliki popularitas dan elektabilitas yang tinggi

3.2.2 Ideologi Partai

Partai Amanat Nasional Kabupaten Wajo menggunakan rekrutmen yang berdasarkan pada ideologi partai politik. Dalam sejarah kepartaian, ideologi partai politik secara garis besar dibagi pada ideologi berdasarkan agama, dan ideologi non agama seperti nasionalis, sosialis dan komunis. Pada perkembangannya ideologi berdasarkan agama diletakan pada gariskan dan ideologi non agama diletakan sebelah kiri. Kecendrungan masyarakat sebagai partisipan dan pemilih tidak terlalu condong ke kanan dan tidak juga condong ke kiri. Untuk itu pada posisi di tengah ini diharapkan Pancasila sebagai titik temu dari ideologi partai tersebut

3.2.3 Finansial

Modal ekonomi atau finansial menjadi salah satu komponen yang harus dimiliki oleh calon legislatif. Tidak bisa dipungkiri untuk menjadi calon legislatif harus memiliki modal ekonomi yang kuat untuk membiayai segala aktivitas pada masa kampanye, seperti penyewaan sekretariat pemenangan, pembuatan alat peraga kampanye, melakukan sosialisasi daerah pemilihan bertemu langsung dengan konstituen seperti pengajian, orang yang sakit dan wilayah yang terdampak musibah.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dalam penelitian pertama oleh Rex Tiran dan Syahrin B Kamahi (2021) Sistem rekrutmen yang diciptakan Golkar yakni rekrutmen terbuka. DPC partai Golkar Kota Kupang menyediakan dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk ikut bersaing dalam proses penyeleksian. Hal yang sama dilakukan juga oleh PAN yang melakukan rekrutmen politik berasal dari internal dan eksternal partai. Internal partai berasal dari kader dan tingkatan pengurus Partai Amanat Nasional Kabupaten Wajo baik dari tingkat kabupaten maupun kecamatan. Penelitian kedua oleh Steven Kaputeni (2020) Partai Nasdem tidak memungut biaya atau mahar politik, yang merupakan terobosan dan gebrakan terbesar bagi partai-partai pencetus kegagalan politik di Indonesia sesuai komitmennya, yaitu Restorasi Indonesia. Sebelum tampil bertekad mendukung calon kepala daerah di Halmahera Utara. Kemudian Partai Amanat Nasional melakukan proses nominasi berkaitan dengan pola kekuasaan dalam tubuh partai dalam menentukan bakal calon seperti apa yang diinginkan. Apakah nominasi ditentukan oleh pimpinan partai (sentralisasi) atau didelegasikan ke bawah (desentralisasi). Dalam tubuh Partai Amanat Nasional Kabupaten Wajo dalam proses penominasian melihat dari potensi kader yang dimiliki terlebih dahulu. Penelitian Ketiga oleh Tarsan Asmara, Misran Safar dan Samiruddin T (2019) bahwa pola rekrutmen DPD II partai Golkar dalam menetapkan calon legislatif pada pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Muna cenderung dilakukan secara tertutup yaitu baik melalui cara koopsi. proses seleksi calon pejabat publik dalam hal ini calon legislatif oleh Partai Amanat Nasional Kabupaten Wajo tersentralisasi di DPD dan DPC tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan tersebut. Akan tetapi dalam prosesnya, semua bakal calon legislatif harus tetap mengikuti tahapan yang dilakukan oleh Partai Amanat Nasional Kabupaten Wajo. Jika berasal dari non kader maka harus mengikuti pengkaderan sebagai anggota partai terlebih dahulu untuk mendapatkan kartu tanda anggota sebagai syarat untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif usungan dari Partai Amanat Nasional Kabupaten Wajo.

IV. KESIMPULAN

Rekrutmen politik merupakan salah satu fungsi penting partai politik karena partai politik membutuhkan kader yang baik untuk mengisi jabatan pemerintahan. Berkat kader yang baik, partai-partai dapat mengidentifikasi kepemimpinan mereka sendiri dan memiliki kesempatan untuk mencalonkan kandidat untuk pertukaran kepemimpinan lokal dan nasional. Sistem rekrutmen yang diciptakan Partai Amanat Nasional Kabupaten Wajo yakni rekrutmen terbuka. Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Wajo menyediakan dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk ikut bersaing dalam proses penyeleksian. Penilaian berdasarkan proses dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, melalui pertimbangan-pertimbangan yang objektif rasional. . Setiap orang yang memenuhi syarat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi baik dalam jabatan politik maupun jabatan administrasi. Secara teori yang dikemukakan oleh Rush dan Althoff, Pola rekrutmen DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Wajo dalam menetapkan calon anggota legislatif untuk pemilu adalah bersifat tertutup karena masih terdapat oligarki, dimana masih dominannya kalangan elite partai dalam pengambilan keputusan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni waktu yang dimiliki dalam pelaksanaan penelitian terbatas hanya 14 hari.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). penulis memfokuskan hasil penelitian ini guna membantu dalam proses pemilihan calon pemimpin daerah Kabupaten Wajo kedepannya, dimana dalam hal ini dikaitkan dengan rekrutmen anggota dari Partai Amanat Nasional yang memiliki cara-cara tersendiri untuk menghasilkan kader pemimpin daerah yang unggul.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama kepada Dewan Pimpinan daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Wajo yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu selama pelaksanaan penelitian ini berlangsung.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Asfahany, F. Partai dan Rekrutmen Politik “Studi Atas Pemilihan Calon Legislatif Non Kader Oleh DPC Partai Gerindra Tangerang Selatan Tahun 2019” (Bachelor's thesis, Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Asmara, T., Safar, M., & Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, J. (2019). POLA REKRUTMEN POLITIK (Studi pada DPD II Partai Golkar dalam Menetapkan Calon Legislatif pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Muna). SELAMI IPS Edisi Nomor, 2.
- Budiardjo, M. (2003). Dasar-dasar ilmu politik. Gramedia pustaka utama
- Kaputeni, S. J. (n.d.). IMPLEMENTASI FUNGSI PARTAI POLITIK SEBAGAI SARANA REKRUTMEN POLITIK (Studi pada Partai Nasdem Halmahera Utara Dalam Pelaksanaan Pilkada 2020).
- Pamungkas, S., & Parlindungan, U. (2011). Partai politik: teori dan praktik di Indonesia. Institute for Democracy and Welfarism.
- Remon, A. Rekrutmen Politik (Studi Tentang Pola Rekrutmen Pdi Perjuangan Dalam Pencalonan Anton Charliyan Sebagai Calon Wakil Gubernur Pada Pemilihan Kepala Daerah Jawa Barat 2018) (Bachelor's thesis, FISIP UIN Jakarta).
- Rush, M., & Althoff, P. (2007). Pengantar Sosiologi Politik, Alih Bahasa oleh Kartini Kartono. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sanit, Arbit, Sistem Politik Indonesia, Jakarta: Rajawali Press, 2012

Tiran, R., Syahrin, ;, & Kamahi, B. (2021). Rekrutmen Politik Partai Golkar Di Kota Kupang Tahun 2019. In Jurnal Politicon Jurnal Program Studi Ilmu Politik (Issue 2).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

